

Anteseden Dan Konsekuensi Kompetensi Aparatur Sipil Negara Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kota Yogyakarta

Arningsih Rizki Pramesti¹,
Citra Ayudiati²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, penerapan good governance, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kompetensi aparatur sipil negara, serta dampak dari kompetensi tersebut terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 65 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua dari lima hipotesis yang diuji memiliki pengaruh yang signifikan. Penerapan good governance berpengaruh signifikan terhadap kompetensi aparatur sipil negara, dan kompetensi aparatur sipil negara berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebaliknya, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi aparatur sipil negara.

Kata Kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Good Governance, Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Abstract

This study aims to examine the influence of budget goal clarity, accounting control, good governance implementation, and information technology utilization on civil servant competence, as well as the impact of that competence on government performance accountability. The research was conducted on Regional Apparatus Organizations (OPD) in Yogyakarta City using a quantitative approach and the Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. Data were collected through questionnaires distributed to 65 respondents. The results indicate that two out of five tested hypotheses show significant effects. The implementation of good governance significantly affects civil servant competence, and civil servant competence significantly influences the performance accountability of government institutions. In contrast, budget goal clarity, accounting control, and information technology utilization do not have significant effects on civil servant competence.

Keywords: Budget Goal Clarity, Accounting Control, Good Governance, Information Technology, Civil Servant Competence, Government Performance Accountability.

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Yogyakarta, email: rizkiarningsih111@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Yogyakarta, email: cayudiati@gmail.com

PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas tidak hanya mencakup pertanggungjawaban fiskal dan manajerial, tetapi juga keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dwi & Sari, 2025). Menurut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang selanjutnya diperbaharui dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Wijaya, 2019).

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas secara nasional, meskipun masih terdapat tantangan di beberapa daerah yang menunjukkan nilai rendah (MENPANRB, 2024). Berbeda dengan kondisi nasional, Pemerintah Kota Yogyakarta secara konsisten meraih predikat 'A' atau memuaskan dalam evaluasi SAKIP selama enam tahun berturut-turut, bahkan dengan peningkatan nilai pada tahun 2024 (Adminwarta, 2024). Prestasi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Yogyakarta.

Beberapa faktor yang diyakini memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, penerapan good governance, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Kejelasan sasaran anggaran memastikan tujuan anggaran terperinci dan spesifik, memudahkan pengukuran keberhasilan (Rahman & Yusuf, 2021). Pengendalian akuntansi berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi aktivitas keuangan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas (Rio Pratama, Henri Agustin, 2019). Penerapan good governance menekankan pada etika profesional, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan publik (Hidayat et al., 2021). Pemanfaatan teknologi informasi mendukung efisiensi dan akurasi pelayanan publik (Amran, 2020). Terakhir, kompetensi ASN menjadi kunci karena pegawai yang kompeten lebih mampu memahami dan melaksanakan tugasnya, yang berdampak pada akuntabilitas kinerja (Sukarno et al., 2020).

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap akuntabilitas kinerja. Misalnya, kejelasan sasaran anggaran ditemukan berpengaruh signifikan oleh (Lutfiah Virgita Budiani, 2021) dan (Brina Kusumaningsari, 2024), namun tidak signifikan oleh (Aprilianti et al., 2020) dan (Rio Pratama, Henri Agustin, 2019). Demikian pula, pengendalian akuntansi ditemukan signifikan oleh (Anisa & Haryanto, 2022) dan (Rio Pratama, Henri Agustin, 2019), tetapi tidak signifikan oleh (Hidayat et al., 2021) dan (Widaryanti, 2020). Ketidaksuaian ini mendorong penelitian ini untuk menguji kembali hubungan antar variabel dengan menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen dan kompetensi ASN sebagai variabel intervening, mengingat pentingnya kedua variabel ini dalam konteks pemerintahan modern (Noormansyah & Arkeda Sirkomba, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review yang bertujuan untuk mengkaji secara konseptual keterkaitan antara sikap keuangan

(financial attitude) dan literasi keuangan (financial literacy) dengan perilaku pengelolaan keuangan pada mahasiswa. Kajian ini berlandaskan pada Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1991), yang dijadikan sebagai kerangka teori utama dalam mengeksplorasi variabel-variabel yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal komparatif. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk menguji hipotesis dan menganalisis hubungan antar variabel menggunakan data numerik dan analisis statistik. Desain kausal komparatif bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antar variabel, yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta peran variabel intervening.

Populasi dan Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Yogyakarta. OPD merupakan unit kerja pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kota. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai aktif yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Yogyakarta.
- 2) Pegawai yang menduduki jabatan minimal satu tahun di OPD, untuk memastikan responden memiliki pemahaman yang memadai mengenai operasional dan akuntabilitas instansi.

Jumlah sampel yang diambil adalah 65 orang, yang tersebar di 13 OPD di Kota Yogyakarta, dengan masing-masing OPD diwakili oleh 5 pegawai.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer kuantitatif. Data primer dikumpulkan secara langsung dari responden melalui metode survei. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner tertutup. Kuesioner ini berisi serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengukur setiap indikator dari variabel penelitian. Responden diminta untuk memberikan tanggapan mereka berdasarkan Skala Likert dengan empat pilihan jawaban:

- 1) Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
- 2) Tidak Setuju (TS) = 2
- 3) Setuju (S) = 3
- 4) Sangat Setuju (SS) = 4

Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada responden di OPD Kota Yogyakarta untuk memastikan tingkat respons yang tinggi dan meminimalkan potensi kesalahpahaman.

Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling - Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan software SmartPLS. Proses analisis data meliputi beberapa tahapan:

Evaluasi Outer Model (Model Pengukuran)

Outer model dalam SEM-PLS digunakan untuk menilai kualitas instrumen penelitian. Uji validitas pada SmartPLS dievaluasi melalui validitas diskriminan dan validitas konvergen. Uji reliabilitas digunakan untuk membuktikan keakurasian, konsistensi, dan ketepatan indikator menjelaskan konstruk.

- 1) Validitas Konvergen (Convergent Validity)

Dinilai dari nilai outer loading. Nilai outer loading yang tinggi menunjukkan korelasi yang kuat antara indikator dengan konstruk latennya. Umumnya, nilai outer loading di atas 0,7 dianggap memenuhi kriteria, namun dalam pengembangan skala pengukuran, nilai antara 0,5 hingga 0,6 masih dapat diterima. Selain itu, validitas konvergen juga dinilai dengan membandingkan nilai square root of average variance extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Dinyatakan valid apabila nilai AVE lebih besar dari 0,5.

2) Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)

Diuji menggunakan nilai cross loading. Jika nilai cross loading suatu indikator pada konstruk latennya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai cross loading-nya pada konstruk laten lain, maka indikator tersebut lebih relevan dengan konstruk laten utamanya. Kriteria umum untuk validitas diskriminan adalah nilai cross loading di atas 0,7.

3) Reliabilitas

Digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi internal suatu instrumen penelitian. Dalam PLS, dapat digunakan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Meskipun keduanya mengukur reliabilitas, Composite Reliability dianggap memberikan estimasi yang lebih akurat. Nilai Composite Reliability yang ideal adalah di atas 0,7, namun nilai antara 0,6 dan 0,7 masih dapat diterima. Nilai Cronbach's Alpha juga sebaiknya lebih besar dari 0,7.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Inner model dalam PLS-SEM adalah peta yang menggambarkan bagaimana berbagai konsep abstrak saling berkaitan satu sama lain. Melalui model ini, hipotesis tentang hubungan sebab akibat antara konsep-konsep tersebut dapat diuji.

1) R-Square

Penilaian model struktural dilakukan dengan penilaian R-Square untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai R-Square dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Nilai R-Square 0,67 menunjukkan model kuat, 0,33 moderat, dan 0,19 lemah.

2) Uji Hipotesis

Dalam uji hipotesis menggunakan PLS-SEM, *p-value* menjadi tolok ukur penting untuk menentukan signifikansi hubungan antara konstruk-konstruk laten. Nilai *p-value* mengindikasikan probabilitas memperoleh hasil yang sama ekstrem atau lebih ekstrem jika hipotesis nol benar. Hipotesis penelitian dinyatakan diterima apabila *p-values* < 0.05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil AVE

Konstruk	Nilai AVE	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,550	Valid
Pengendalian Akuntansi	0,565	Valid
Penerapan <i>Good Governance</i>	0,752	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,637	Valid
Kompetensi Aparatur Sipil Negara	0,638	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,683	Valid

Sumber: Data diolah, 2025

Nilai AVE untuk masing-masing variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, penerapan *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur sipil negara, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih besar dari nilai 0,5 sehingga setiap variabel dalam model penelitian ini telah memiliki *convergent validity* yang baik.

Uji Reabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas *Composite Reliability*

Konstruk	Nilai <i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,906	Reliabel
Pengendalian Akuntansi	0,912	Reliabel
Penerapan <i>Good Governance</i>	0,948	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,897	Reliabel
Kompetensi Aparatur Sipil Negara	0,913	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,955	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2025

Uji reliabilitas bertujuan mengetahui tingkat konsistensi suatu instrumen. Variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Composite Reliability* > 0,07. Seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini sudah memiliki nilai diatas kriteria yang ditetapkan yaitu 0,70.

R Square

Tabel 3. Hasil Uji *R Square*

Konstruk	R-Square	R-Square Adjusted
Kompetensi Aparatur Sipil Negara	0,491	0,457
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,578	0,571

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil uji *R square* menunjukkan hasil pengujian koefisien determinasi variabel Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebesar 0,491 yang menunjukkan bahwa model termasuk kategori moderat karena nilai R-square kurang dari 0,67 dan lebih dari 0,33 dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,578 yang menunjukkan bahwa model termasuk kategori moderat karena nilai R-square kurang dari 0,67 dan lebih dari 0,33.

Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Hubungan	Hipotesis	P values	Hasil Signifikan	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran >Kompetensi Aparatur Sipil Negara	H1	0.312	P Value > 5% 0,312 > 0,005	H1 Ditolak
Pengendalian Akuntansi >Kompetensi Aparatur Sipil Negara	H2	0.469	P Value > 5% 0,469 > 0,005	H2 Ditolak
Penerapan <i>Good Governance</i> >Kompetensi Aparatur Sipil Negara	H3	0.003	P Value < 5% 0,003 < 0,005	H3 Diterima
Pemanfaatan Teknologi Informasi >Kompetensi Aparatur Sipil Negara	H4	0.204	P Value > 5% 0,204 > 0,005	H4 Ditolak
Kompetensi Aparatur Sipil Negara > Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	H5	0,000	P Value < 5% 0,000 < 0,005	H5Diterima

Sumber: Data diolah, 2025

Pembahasan

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Hasil pengujian menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi ASN. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun dalam perencanaan anggaran sudah diterapkan prinsip-prinsip kejelasan, spesifik, dan terukur—yang semestinya mampu menjadi pedoman kerja yang baik—namun dalam praktiknya, hal tersebut belum secara nyata mendorong peningkatan kompetensi aparatur. Hal ini mungkin terjadi karena sasaran anggaran lebih banyak dipahami sebagai alat ukur pencapaian organisasi, bukan sebagai instrumen pembelajaran atau pengembangan personal ASN.

Secara konseptual, kejelasan sasaran anggaran seharusnya dapat membantu ASN memahami peran mereka dalam struktur organisasi dan memfasilitasi pencapaian tujuan strategis instansi secara efektif. Namun jika tidak disosialisasikan dengan baik atau tidak dikaitkan secara langsung dengan kinerja dan pembinaan individu, maka kejelasan tersebut hanya akan menjadi formalitas administratif. ASN yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran tidak otomatis mendapatkan pengalaman atau pengetahuan baru yang dapat menambah kompetensinya.

Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Aprilianti et al., 2020) dan (Widaryanti, 2020), yang menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja atau akuntabilitas ASN. Oleh karena itu, agar kejelasan anggaran dapat mendorong kompetensi pegawai, maka perlu adanya integrasi antara perencanaan anggaran dan program pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia di instansi pemerintah.

Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Kompetensi ASN

Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi ASN. Secara teori, pengendalian akuntansi merupakan mekanisme internal untuk memastikan keakuratan data keuangan, mencegah penyimpangan, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan anggaran. Namun dalam konteks peningkatan kompetensi individu ASN, peran pengendalian akuntansi tidak terlalu dominan.

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh implementasi pengendalian akuntansi yang lebih fokus pada pelaporan administratif dan prosedur normatif daripada sebagai sarana pembelajaran organisasi. Dalam banyak kasus, pengendalian lebih bersifat top-down dan digunakan untuk keperluan audit, bukan sebagai alat reflektif bagi pegawai untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas mereka. Akibatnya, sistem ini tidak memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional ASN.

Hasil ini sejalan dengan studi oleh (Hidayat et al., 2021), yang mengungkapkan bahwa pengendalian akuntansi di sektor publik Indonesia masih cenderung bersifat reaktif, tidak partisipatif, dan belum terintegrasi dalam sistem manajemen kinerja pegawai. Diperlukan pendekatan yang lebih strategis agar pengendalian akuntansi juga dapat menjadi instrumen pembelajaran dan pengembangan kompetensi ASN.

Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Kompetensi ASN

Berbeda dari dua variabel sebelumnya, penerapan good governance terbukti berpengaruh signifikan terhadap kompetensi ASN. Hasil ini menegaskan bahwa prinsip-

prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan budaya organisasi yang mendukung pengembangan kompetensi pegawai. Instansi pemerintah yang menerapkan good governance biasanya memiliki sistem yang terbuka dan adil, yang memberikan ruang bagi ASN untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, bertanggung jawab atas tugasnya, dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Lingkungan kerja yang mendukung partisipasi dan tanggung jawab mendorong ASN untuk terus belajar, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta menunjukkan sikap kerja yang positif. Hal ini selaras dengan prinsip dalam teori stewardship yang menyatakan bahwa manajer publik (dalam hal ini ASN) akan bekerja dengan optimal apabila mereka merasa dipercaya, dihargai, dan dilibatkan dalam proses kerja organisasi.

Penelitian ini memperkuat temuan (Israr & Syofyan, 2022) serta (Brina Kusumaningsari, 2024), yang menyatakan bahwa implementasi prinsip good governance yang konsisten dan menyeluruh berdampak positif terhadap peningkatan kualitas SDM, termasuk dalam hal pengembangan kompetensi aparatur negara.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kompetensi ASN

Pemanfaatan teknologi informasi ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi ASN. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun teknologi informasi telah digunakan secara luas di lingkungan pemerintah, penggunaannya belum sepenuhnya mendukung pengembangan kompetensi personal pegawai. Teknologi hanya digunakan sebagai alat bantu administratif dan pelaporan, seperti aplikasi e-budgeting, e-sakip, atau e-performance, tanpa ada pendampingan atau pelatihan intensif bagi ASN agar dapat menggunakan teknologi tersebut sebagai media belajar dan pengembangan.

Kendala utama dalam hal ini bisa jadi berasal dari rendahnya literasi digital ASN, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kurangnya integrasi sistem informasi manajemen dengan sistem pembinaan pegawai. Akibatnya, teknologi tidak dimanfaatkan sebagai alat untuk peningkatan kapasitas, melainkan hanya untuk pelaksanaan rutinitas kerja. Selain itu, beban administratif berbasis aplikasi yang terlalu berat justru bisa menimbulkan kejenuhan dan tidak memberikan ruang reflektif bagi ASN untuk belajar.

Hasil ini bertentangan dengan temuan (Harianto et al., 2021), yang menyatakan bahwa teknologi informasi berkontribusi terhadap peningkatan kinerja ASN. Namun, dalam konteks penelitian ini, variabel yang diuji adalah kompetensi, bukan langsung kepada output kinerja, sehingga efeknya tidak serta-merta terlihat signifikan.

Pengaruh Kompetensi ASN terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi ASN berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan ini merupakan kontribusi penting karena menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu pilar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. ASN yang kompeten tidak hanya mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga memiliki integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab terhadap capaian hasil kerja yang terukur dan transparan.

Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menjalankan peran secara efektif. Aparatur yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih responsif terhadap dinamika kebijakan publik, mampu menyusun laporan pertanggungjawaban yang akurat, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat

secara cepat dan tepat. Dalam konteks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kompetensi ASN menjadi salah satu penentu utama kualitas laporan kinerja instansi.

Hasil ini diperkuat oleh penelitian (Noormansyah & Arkeda Sirkomba, 2022) serta (Lutfiah Virgita Budiani, 2021), yang menyebutkan bahwa peningkatan kompetensi ASN secara sistematis akan berdampak langsung pada meningkatnya tingkat akuntabilitas di sektor pemerintahan, baik dalam aspek teknis, administratif, maupun pelayanan publik.

SIMPULAN

- 1) Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi ASN, menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang jelas belum mampu mendorong peningkatan kapasitas individu ASN secara langsung.
- 2) Pengendalian akuntansi juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kompetensi ASN, yang mengindikasikan bahwa sistem pengendalian lebih banyak difokuskan pada aspek administratif daripada pembinaan SDM.
- 3) Penerapan good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi ASN. Lingkungan kerja yang transparan, partisipatif, dan akuntabel terbukti efektif dalam mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN.
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kompetensi ASN. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi belum dioptimalkan sebagai alat strategis dalam pengembangan kompetensi pegawai.
- 5) Kompetensi ASN berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. ASN yang kompeten mampu bekerja secara efektif, bertanggung jawab, dan menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

REFERENSI

- Adminwarta. (2024). *Nilai Sakip Pemkot Yogya Meningkat, Pertahankan Predikat A*. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/35894>
- Amran, A. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah: Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.35906/ja001.v5i1.527>
- Anisa, I. N., & Haryanto, H. (2022). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di masa pandemi covid-19. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(1), 77–85. <https://doi.org/10.17977/um004v9i12022p077>
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 150–159. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.454>
- Brina Kusumaningsari, F. H. (2024). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1, 402–413. <https://doi.org/10.33061/jasti.v1i6i4.6235>
- Dwi, O., & Sari, S. (2025). PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

- TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA OPD KOTA SURABAYA. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 11(1), 49–59.
- Harianto, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 122–139. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i1.111>
- Hidayat, T., Putri, A. M., & Murialti, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Kompetensi, dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi: Optimalisasi Zakat Dan Wakaf Dalam Membangun Ekonomi Indonesia*, 1, 87–97. <https://ejurnal.umri.ac.id>
- Israr, N. H., & Syofyan, E. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(4), 686–697. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i4.550>
- Lutfiah Virgita Budiani, N. F. A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–20. www.surabaya.go.id
- MENPANRB, H. (2024). *Tren Kenaikan SAKIP Selama 10 Tahun, Menteri PANRB: Korelasi Positif Akuntabilitas Kinerja dengan Akselerasi Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tren-kenaikan-sakip-selama-10-tahun-menteri-panrb-korelasi-positif-akuntabilitas-kinerja-dengan-akselerasi-pembangunan-dan-pengentasan-kemiskinan>
- Noormansyah, I., & Arkeda Sirkomba, H. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Asn, Dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 618–627.
- Rahman, A., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Journal of Management*, 4(2), 257–270. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.334>
- Rio Pratama, Henri Agustin, S. T. (2019). Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1, 429–444. <https://doi.org/10.34152/fe.15.2.477-492>
- Sukarno, S. A., Tinangon, J. J., & Tangkuman, S. J. (2020). Pengaruh kompetensi aparat dan komitmen organisasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara). *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.32400/iaj.27981>
- Widaryanti. (2020). ANALISIS PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 32, 376–390. <https://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe>
- Wijaya, Y. (2019). *Sistem Akuntabilitas Kinerja*. <https://www.panaaha.go.id/akuntabilitas/sistem-akuntabilitas-kinerja/137>